

74 Rumah di Bojongsari Rusak Akibat Angin Puting Beliung

DEPOK (IM) - Sebanyak 74 rumah di kawasan Bojongsari, Sawangan Depok rusak akibat angin puting beliung pada Minggu (26/9) sore. Kerusakan rata-rata pada bagian atap.

"Data sementara sebanyak 74 rumah rusak akibat angin kencang," kata Sekretaris Kecamatan Bojongsari, Zikri Dwi Darmawan, Senin (27/9).

Puluhan rumah yang rusak itu masuk dalam kategori berat dan ringan. Sebanyak 74 rumah yang rusak itu tersebar di tiga Kelurahan di wilayah Bojongsari. Di Kelurahan Serua tercatat 12 rumah yang rusak, di Kelurahan Pondok Petir sebanyak 50 rumah, dan Kelurahan Curug 12 rumah.

"Selain itu terdapat fasilitas milik Pemerintah Kota Depok yang ikut terdampak yaitu Taman Kelurahan dan Taman RW di Kelurahan Serua. Fasilitas tersebut rusak

dikarenakan pohon tumbang tidak kuat menahan terpaan angin," ungkapnya.

Kemudian juga terdapat satu mobil pickup mengalami kerusakan pada kaca bagian depan. Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dilakukan secara swadaya. Namun untuk kategori rusak berat akan diupayakan pengajuan ke Pemkot Depok.

"Untuk kerusakan dilakukan perbaikan secara swadaya masyarakat. "Kalau yang kerusakan berat akan diajukan bantuan perbaikan ke Wali Kota Depok," tambahnya.

Terpisah, Lurah Serua, Sanudin mengatakan, pihaknya telah melaporkan rumah warga maupun fasilitas taman yang rusak. Ditegaskan tidak ada korban dalam peristiwa kemarin.

"Perbaikannya dilakukan swadaya masyarakat, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," tutupnya. ● pp

Pemkot Bandung Minta Apotek Sediakan Ruang Produk UMKM

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, meminta para pengelola apotek menyediakan ruang untuk memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan kolaborasi bisnis lintas bidang itu dapat menjadi wujud kepedulian untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Beberapa apotek menjadi ruang displai bagi pengusaha UMKM. Kami dorong UMKM yang terdampak Covid-19 terus berinovasi dan berkreasi," kata Yana.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi suatu hal yang saling menguntungkan antara pemilik atau pengusaha apotek dengan pelaku UMKM.

Di samping itu, Yana juga meminta para apoteker terus mengembangkan pengetahuan. Apalagi setelah terjadi pandemi Covid-19, bidang kesehatan menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan. Dengan pengetahuan

yang terus berkembang, maka apoteker bisa bermanfaat lebih bagi masyarakat. Sebagai contoh, ketika masyarakat menanyakan obat paling cocok dengan kondisinya, apoteker bisa memberikan rekomendasi yang terbaik.

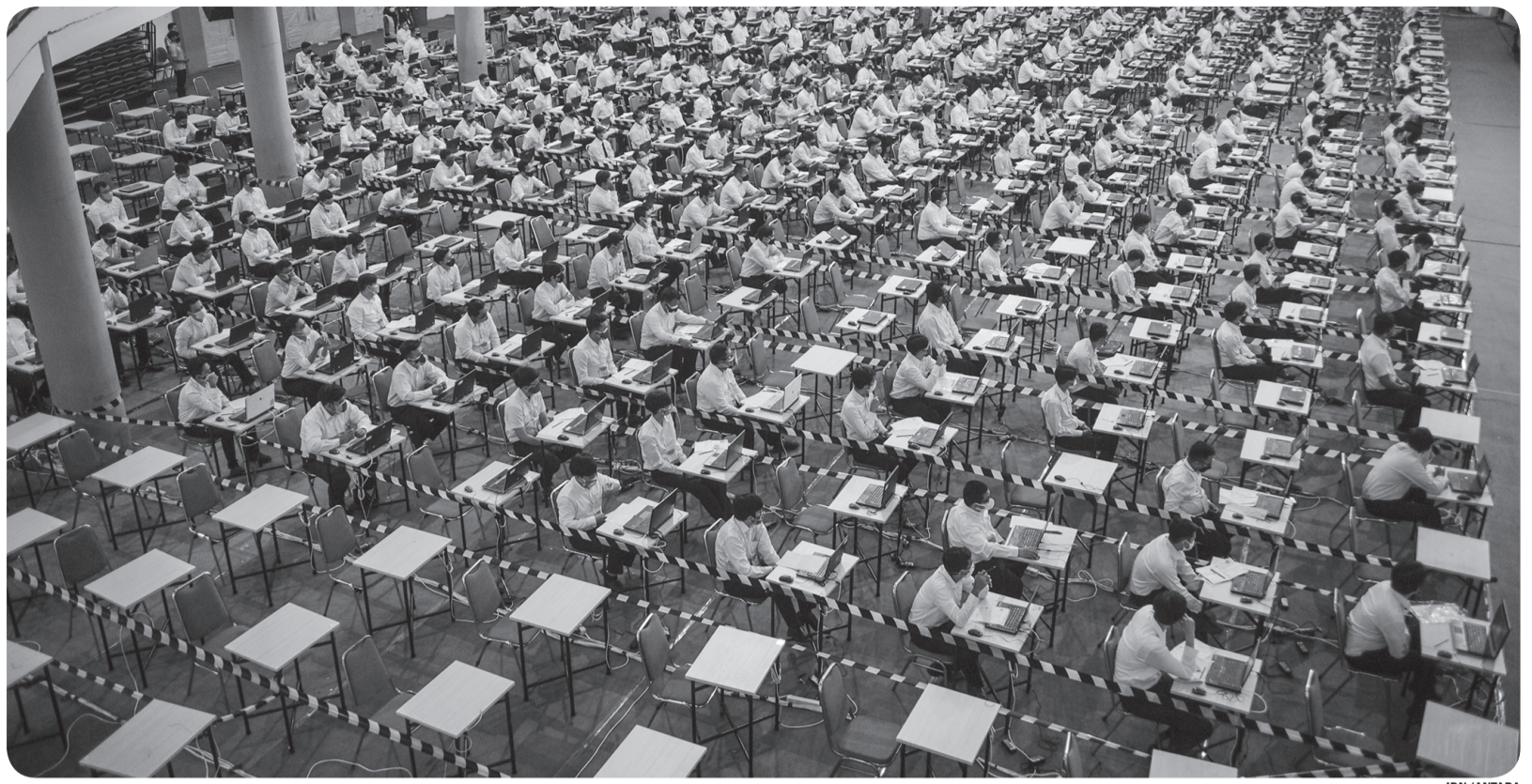
"Sehingga masyarakat menjadi semakin percaya," kata Yana.

Sementara itu, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Bandung, Yena Iskandar menyatakan siap untuk mendorong anggotanya menyediakan tempat untuk pelaku UMKM memasarkan produknya.

Baginya, hal itu menjadi salah satu tanggung jawab dan kepedulian apoteker terhadap pemulihan ekonomi, termasuk berkembangnya UMKM.

"Melalui sinergitas ini, rekan rekan UMKM bisa semakin maju usahanya. Kami harap juga produk UMKM bisa dijual di seluruh gerai apotek wilayah Kota Bandung, sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya," kata Yana. ● pur

8 | Nusantara



SELEKSI TES CPNS DI BANDUNG

Peserta mengikuti tes seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/9). Pemerintah Kota Bandung membuka 3.523 formasi dalam penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Defisit APBD Kabupaten Bogor Sekitar Rp794 Miliar!

Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut, akibat terjadinya defisit, maka biaya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas lainnya akan dikurangi. Hal ini agar anggaran penanganan wabah Covid-19 dan hal penting lainnya tetap bisa dilaksanakan.

CIBINONG (IM)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2021 masih defisit sekitar Rp 794 miliar. Karena itu, eksekutif dan legislatif pun melakukan penyesuaian kebijakan maupun program

kerja daerah.

"APBD Kabupaten Bogor yang awalnya Rp7,2 triliun kini diusulkan menjadi Rp8,9 triliun. Namun karena anggarannya masih defisit sebesar Rp794 miliar akibat terdampak pandemi Covid-19 dan hal

lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian, lalu dibahas dan akhirnya akan menjadi peraturan daerah (Perda) RAPBD-P," kata Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan, Senin (27/9).

Wanita berusia 53 tahun ini menjamin penyesuaian dalam APBD-P ini tidak akan menggeser anggaran untuk penanganan wabah Covid-19, pembayaran BPJS aparatur daerah dan lainnya.

"Karena terjadi defisit, maka biaya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas lainnya akan kami kurangi, agar anggaran penanganan wabah Covid-19 dan hal penting lainnya tetap bisa dilak-

sanakan," terangnya.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan berharap selama 3-4 hari mendatang, defisitnya APBD tahun ini bisa ditemukan solusinya, baik oleh eksekutif maupun legislatif.

"Karena situasinya APBD Tahun 2021 ini defisit, maka dibantu pimpinan dan anggota Dewan kami akan menunda anggaran-anggaran yang dianggap bukan prioritas. Kita harus bisa menyesuaikan antara anggaran dengan program kerja yang sebelumnya sudah kita rencanakan," harap Iwan.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Ridwan Muhibi berpendapat, dalam penyesuaian RAPBD-P, pihak eksekutif jangan melupakan pemulihan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.

"Eksekutif kami harapkan meniadakan anggaran dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, bentuknya bisa pemberian stimulus bantuan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM), penyediaan lapangan kerja, kemudahan izin usaha dan menggiatkan padat karya dalam proyek infrastruktur," harap Ridwan.

Anggota Fraksi Partai Ke-

adilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Fathoni menuturkan bahwa dalam pembahasan RAPBD-P Tahun 2021, badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran pendapatan belanja daerah (TAPBD) dalam melakukan penyesuaian harus sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena dalam penyesuaian RAPBD-P ini, dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku," tutur Fathoni.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Romli menjelaskan sebelum tanggal 30 September mendatang, RAPBD-P Tahun 2021 ini harus segera ditandatangani, hingga eksekutif dan legislatif pun kerap melaksanakan rapat hingga malam hari.

"Rapat RAPBD-P ini akan kami kebut hingga kadang dilaksanakan hingga malam dan bahkan dilaksanakan di akhir pekan. Hal itu kami lakukan karena deadline draft RAPBD-P diberikan tenggat waktu hingga tanggal 30 September mendatang oleh Pemprov Jawa Barat," jelas Romli. ● gio

149 Sekolah Kluster PTM Terbatas di Jabar, Ternyata Hanya Miss Communications

BANDUNG (IM) - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) langsung melakukan penelusuran terkait dugaan ada 149 sekolah yang berdasarkan data Kemendikbud Ristek disebut-sebut sebagai kluster Covid-19 Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Hasilnya, nihil. Jadi hanya, miss communications Kadisdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, pihaknya sudah mengecek di lapangan terkait data tersebut. Mengingat saat ini—sesuai data Dapodik, sudah ada 1.295 dari 5.533 sekolah yang sudah melakukan PTM Terbatas.

"Kita sudah cek lewat pengawasan dan cabang dinas di berbagai daerah. Tidak ada satu pun kluster PTM. Akhirnya kita coba mengecek ke jejaring dari sumber yang ada, ternyata sumber itu setelah dibuka dan diklik tidak muncul datanya," katanya pada Gebyar Vaksinasi Disabilitas Kota Bandung, di SLBN Cicendo, Sabtu kemarin.

"Dan kita konfirmasi ke Pusdatin dan kemendikbud, ternyata telah terjadi miss communication," lanjutnya.

Menurut Dedi, yang dimaksud dengan kluster bukan ada kluster PTM. Melainkan, ada data peserta didik pernah Covid-19 yang mengikuti PTM.

"Jadi ini miss communications. Jadi kita sampaikan kepada publik bahwa tidak ada kluster PTM dan mohon doanya jangan sampai ada kluster PTM di Jabar," ucapnya.

Namun, kata Dedi, kalau ditemukan kasus covid di kluster PTM, pertama sekolah



DEDI SUPANDI
Kadis Pendidikan Jabar

harus melakukan tindakan segera. Yang kedua menutup sementara. "Dan ketiga setelah menutup sementara terus disemprot disinfektan maka silakan buka kembali," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan ada ribuan kasus baru terjadi pada sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Kemendikbudristek menjelaskan ada 1.303 kluster Covid-19 terjadi pada saat proses pembelajaran tatap muka (PTM) digelar di sekolah-sekolah tanah air. Di antaranya, sebanyak 149 sekolah ada di Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun angkat bicara. Menurut dia, hal itu masih perlu dikonfirmasi.

"Nah ini yang penting ada temuan Kemendikbudristek ada 149 kluster sekolah di Jawa Barat Covid tapi laporan dari dinas pendidikan kami bahwa itu datanya belum valid," ujar Ridwan dalam jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Jumat (24/9). ● lys



BADUT SOSIALISASI PROKES DI SEKOLAH

Komunitas Badut Tasikmalaya (Battik) menyanyikan lagu 3M saat sosialisasi protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka SD Negeri Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (27/9). Komunitas Badut Tasikmalaya melakukan edukasi protokol kesehatan dengan aktraksi dan permainan interaktif serta membagikan masker guna mencegah penyebaran Covid-19 serta meminimalisasi kluster baru di lingkungan sekolah saat pembelajaran tatap muka terbatas.

Pembelian Mobil Dinas Baru Bupati Karawang dan Wakilnya Menuai Protes

KARAWANG (IM) - Pembelian mobil dinas mewah Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana dan wakilnya, Aep Syaepuloh menuai protes. Pasalnya pembelian dua mobil mewah yang menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar tersebut dibeli di tengah pandemi Covid-19, dan dinilai melukai hati masyarakat.

"Kondisi sekarang ini masa pandemi. Tentu banyak anggaran pembangunan, kegiatan sosial dan lain-lain yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19. Tapi Pemkab Karawang justru membeli mobil mewah untuk kendaraan dinas bupati, wakil bupati," kata Ketua LSM Lodaya, Nace Permana, Senin (27/9).

Menurutnya, sangat disayangkan Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pembelian dua mobil jenis terbaru, yakni Mazda CX-9 AWD. Harga satu mobil Mazda CX-9 AWD itu mencapai Rp850 sampai Rp998 juta atau nyaris mencapai Rp1

miliar. "Secara regulasi memang tidak ada pelanggaran terkait dengan pembelian mobil dinas mewah untuk bupati dan wakil bupati. Tapi paling tidak, ada hal yang menjadi pemikiran pihak Pemkab, minimal bisa menunjukkan rasa empati kepada masyarakat, karena sekarang ini situasinya pandemi. Masyarakat banyak yang terganggu perekonomiannya di masa pandemi ini, ini Pemda malah beli mobil dinas mewah," tuturnya.

Seharusnya, kata Nace, pada masa pandemi seperti sekarang ini anggaran yang cukup besar itu digunakan untuk penggunaan hal yang lebih penting, seperti penanganan perekonomian masyarakat atau hal lainnya.

"Kita sangat menyayangkan, pemimpin Karawang seakan-akan tidak punya rasa empati kepada masyarakat yang banyak terganggu perekonomiannya dengan membeli mobil dinas pada masa pandemi ini, pada masa refocusing anggaran APBD," ujarnya. ● pur

Wisatawan Turun, Pemkot Bogor Kaji Pembukaan Kampung Tematik

BOGOR (IM) - Selama pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan di Kota Bogor menurun hingga 80 persen. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana memaksimalkan empat lokasi wisata kampung tematik berbasis masyarakat di Kota Bogor.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Wawan Sanwani memaparkan, pada 2019 jumlah wisatawan di Kota Bogor diperkirakan mencapai kurang lebih tujuh juta per tahun. Memasuki pandemi Covid-19, jumlah wisatawan menurun pada angka dua juta per tahun.

Sementara, pada 2018 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 7,9 juta. Sedangkan dalam 10 tahun terakhir, kata dia, rata-rata kunjungan wisatawan ke Kota Bogor berkisar lima juta setiap tahunnya. "Itu data yang kita punya. Jika dihitung perbandingan 2020 dari 2019 drop hampir 80 persen," ujar Wawan, Senin (27/9).

Saat ini, sambung dia, tempat wisata di Kota Bogor yang baru beroperasi hanyalah JBound di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dibukanya JBound merupakan rekomendasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf).

Wawan mengatakan, Pemkot Bogor pun tidak dapat merekomendasikan lokasi wisata mana yang sebaiknya dibuka, ke pemerintah pusat. Lantaran, kriteria dan penilaian dari dibukanya tempat wisata itu dilakukan langsung oleh Kemparekraf. "Jadi ada uji coba di beberapa titik wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Salah satunya Jbound di Bogor," tuturnya.

Melihat situasi dan kondisi wisata di Kota Bogor, Wawan mengatakan, di masa PPKM Level 3, wisatawan yang datang ke Kota Bogor cenderung mengincar kuliner. Kendati demikian, saat ini Pemkot Bogor juga akan memaksimalkan tempat wisata berbasis ma-

sarakat, yang disebut sebagai kampung tematik.

Wawan menyebutkan, kampung tematik yang sedang berjalan di Kota Bogor yakni Kampung Tematik Cibuluh. Serta ada empat kajian kampung tematik lain yang direncanakan pada tahun ini di Kelurahan Genteng, Empang, Bubulak dan Katulampa.

Di Kelurahan Empang, sambung dia, akan dibuat Kampung Religi, di Bubulak akan dibuat Kampung Lauk (ikan), di Katulampa rencananya akan dibuat kampung eduwisata, dan di Bojengkerta, akan memaksimalkan potensi wisata air.

"Bojengkerta itu daerah cadas dan aliran sungai, mau dibikin kaya Grand Canyon ya. Empat destinasi itu, kita bikin kajiannya dulu seperti apa," tambah Wawan.

Ia berharap pada 2022, kajian itu rampung dan sudah bisa terlaksana, seiring dengan makin membaiknya kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. ● gio



KEBUN BINATANG BANDUNG KEMBALI DIBUKA

Pengunjung melihat jerapah di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat, Senin (27/9). Kebun Binatang Bandung yang biasa disebut Bandung Zoological Garden kembali membuka kunjungan bagi warga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masa PPKM level 3 di Kota Bandung.